KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Tekan Pemerintah Kucurkan Duit Proyek Gedung Baru
Tanggal : Rabu, 18 April 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7

DPR Tekan Pemerintah Kucurkan Duit Proyek Gedung Baru

Presiden tak menanggapi surat yang dikirim DPR akhir tahun lalu.

Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat bakal mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta penjelasan ihwal pembangunan gedung baru bagi anggota Dewan. Terutama bujet sebesar Rp 601 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang hingga kini belum dikucurkan oleh Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan bahwa surat yang bakal dikirimkan oleh pimpinan Dewan itu merupakan kelanjutan dari warkat yang pernah ia kirimkan ke Presiden Jokowi pada akhir tahun lalu. Ketika itu, Fadli menjabat pelaksana tugas Ketua DPR. "Sampai saat ini surat itu tidak dibalas oleh Presiden. Dan hasil dari rapat pimpinan pada Senin lalu, kami sepakat Ketua DPR akan mengirimkan surat serupa," ujarnya di DPR kemarin.

Padahal, politikus Gerindra ini melanjutkan, dana itu sangat mendesak untuk dikucurkan karena gedung DPR merupakan kebutuhan serta masuk sebagai aset negara. Selain itu, ucap Fadli, jumlah anggota Dewan bakal bertambah menjadi 575 orang pada periode 2019-2024, sehingga membutuhkan ruang kerja tambahan dari saat ini yang berjumlah 560.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti, menguatkan pernyataan Fadli itu, terutama butuh izin dari Presiden Jokowi agar tahapan pembangunan bisa berjalan. Padahal, dia melanjutkan, biasanya anggaran tahunan sudah dikucurkan ke lembaganya oleh Kementerian Keuangan setiap Januari. "Kami perlu kepastian, apakah boleh membangun atau tidak," ujarnya.

Jika sudah dikucurkan, Damayanti melanjutkan, Sekretariat Jenderal DPR bakal membuka perencanaan lelang untuk menentukan konsultan pembangunan proyek. Damayanti mengatakan Sekretariat Jenderal juga telah mempunyai konsep gedung yang bakal memberikan ruang kerja seluas 117 meter persegi untuk satu anggota DPR.

Rencana pembangunan gedung DPR kembali mencuat pada pekan lalu. Musababnya, Badan Urusan Rumah Tangga DPR kembali mengusulkan dana Rp 640,86 miliar untuk tahapan pembangunan gedung DPR dalam Rancangan APBN 2019 dengan total Rp 7,7 triliun.

Rincian bangunan itu adalah Rp 359,27 miliar untuk gedung baru dan Rp 281,58 miliar untuk alun-alun demokrasi. Seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna pun menyetujui penambahan anggaran pembangunan gedung maupun internal mereka ini. Padahal Kementerian Keuangan belum mengucurkan dana Rp 601 miliar karena belum mendapatkan izin dari Presiden.

Ketua DPR Bambang Soesatyo belum bisa memberi tahu kapan surat permintaan penjelasan ihwal gedung baru DPR ini akan dikirimkan. "Saya belum tahu. Akan saya kabari," ujarnya.

Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, Askolani, lepas tangan ihwal polemik pengucuran dana maupun penambahan bujet ini. "Lebih pas ditanyakan ke Sekretaris Jenderal DPR yang lebih tahu dan detail," ujarnya. Adapun Sekretaris Kabinet Pramono Anung belum dapat dihubungi. Namun, dalam beberapa kesempatan, Pramono mengatakan moratorium pembangunan gedung baru pemerintah masih berjalan.

● GHOIDA RAHMAH | AHMAD FAIZ

POLEMIK 12 TAHUN

Dewan Perwakilan Rakyat ingin membangun gedung baru sejak 12 tahun lalu. Perencanaan proyek gedung ini kerap tak transparan. Berikut ini perjalanan upaya DPR dalam membangun gedung baru tersebut.

4 FEBRUARI 2006
DPR membentuk Tim Kajian Peningkatan Kinerja untuk mengatasi rendahnya tingkat kehadiran anggota dan produktivitas legislasi. Menurut kajian, ruang sidang yang dinilai tidak nyaman menjadi penyebab. Muncullah rencana pembangunan gedung baru.

2008-2009
Sekretariat Jenderal DPR menyodorkan konsep gedung baru DPR berbentuk huruf U terbalik.

2010
Ketua DPR Marzuki Alie memperoleh gambaran lengkap rencana gedung baru DPR, sehingga menurut dia tak perlu ada sayembara. Pembangunan ditunda hingga 2011.

11 MARET 2011
Setjen DPR mengungkapkan kajian Kementerian Pekerjaan Umum bahwa biaya pembangunan gedung Rp 1,138 triliun.

23 MEI 2011
Marzuki Alie membatalkan rencana pembangunan gedung.

NOVEMBER 2014
Usul pembangunan gedung baru DPR muncul kembali.

12 FEBRUARI 2015
Grand design penataan fisik gedung DPR masuk komponen penambahan anggaran DPR usulan Badan Urusan Rumah Tangga. Total tambahan anggaran Rp 1,6 triliun.

30 OKTOBER 2015
Rapat paripurna DPR menyetujui RAPBN 2016, termasuk duit ratusan miliar rupiah bagi Sekretariat Jenderal DPR yang disebut-sebut untuk pembangunan gedung baru.

NOVEMBER 2015
DPR menetapkan pemenang sayembara desain gedung.

4 JULI 2017
Usul pembangunan gedung kembali mencuat. Ada dana Rp 601 miliar untuk megaproyek itu.

OKTOBER 2017
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 601 miliar dan masuk APBN 2018.

10 APRIL 2018
Dewan meminta anggaran gedung DPR Rp 640 miliar untuk 2019. Namun dana untuk perencanaan Rp 601 miliar tak kunjung dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

HUSSEIN ABRI DONGORAN

PERPUSTAKAAN DPR RI